

SISTEM POLITIK

APA ITU SISTEM

Menurut Miriam Budiarjo, konsep sistem diambil dari ilmu Biologi, yang artinya bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling bergantung antara satu dan lainnya untuk saling berinteraksi.

APA ITU POLITIK ...

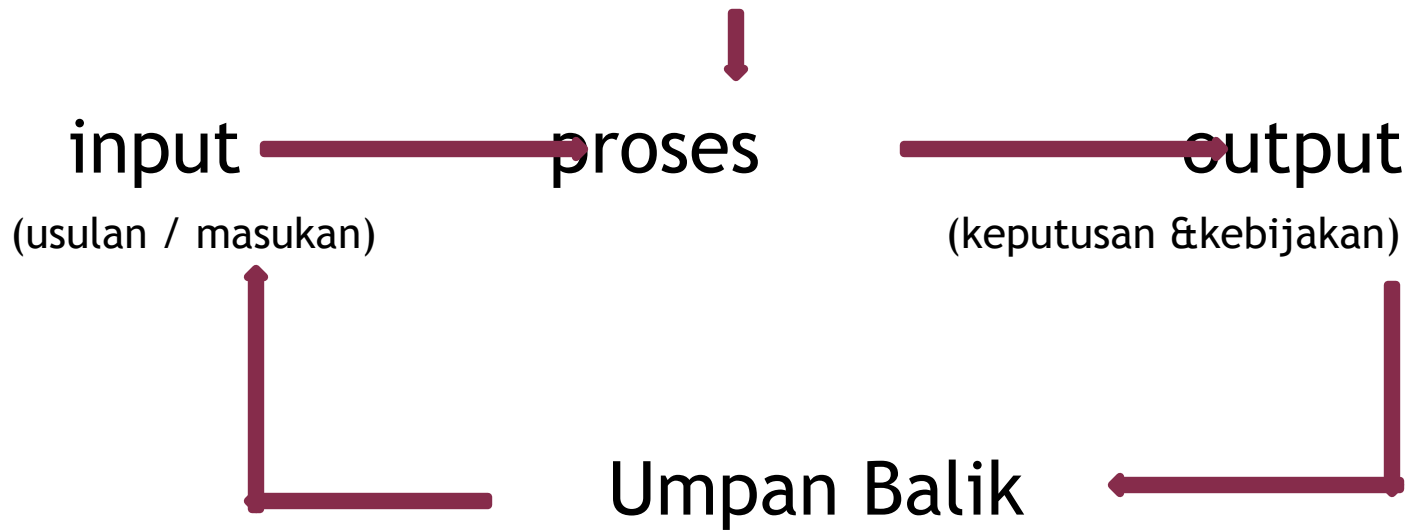
Politik adalah strategi atau cara yang ditentukan oleh seorang individu / suatu kelompok untuk mencapai sesuatu.

DEFINISI SISTEM POLITIK

Menurut sri Soemantri, sistem politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yang dilembagakan sesuai fungsinya masing-masing. Baik suprastruktur politik maupun infrastruktur politik.

BAGAN SISTEM POLITIK

Lingkungan / SDA



KOMPONEN SUPRASTRUKTUR POLITIK

Suprastruktur adalah lembaga-lembaga negara yang akan membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Komponen Suprastruktur adalah...

1. Lembaga Eksekutif
2. Lembaga Legislatif
3. Lembaga Yudikatif

Suprastruktur dibagi 2 :

- Suprastruktur tingkat pusat : Pemerintah pusat, yaitu presiden, menteri (kabinet), Perdana menteri ; lembaga tinggi negara (MPR, DPR, MA, BPK, MK, KY)
- Suprastruktur tingkat daerah: pemda Propinsi / Kabupaten, Muspida (Kodam, Korem, Koramil , Kejati, Kejari), Legislatif (DPRD Propinsi / Kabupaten)

KOMPONEN INFRASTRUKTUR POLITIK

Infrastruktur adalah badan-badan organisasi politik yang berkaitan dengan pengelompokkan warga negara atau anggota masyarakat.

Komponen Infrastruktur adalah

1. Partai Politik
2. Kelompok Kepentingan
3. Organisasi Masyarakat
4. Media Massa

4 VARIABEL DALAM SISTEM POLITIK

- ◉ Kekuasaan, sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan
- ◉ Kepentingan, tujuan-tujuan yang akan dikejar oleh pelaku-pelaku politik
- ◉ Kebijakan, yaitu hasil interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk perundang-undangan
- ◉ Budaya Politik, yaitu orientasi subjektif dari individu terhadap sistem politik.

CIRI SISTEM POLITIK

- ◉ Memiliki Budaya Politik
- ◉ Memiliki fungsi-fungsi yang Sama
- ◉ Struktur Politik Mempunyai Spesialisasi dalam melaksanakan fungsinya

PERBEDAAN SISTEM POLITIK NEGARA LIBERAL, DEMOKRASI DAN KOMUNIS

- ❑ Sistem Politik negara Liberal, yaitu adanya kebebasan berpikir bagi tiap individu dan kelompok ; pembatasan kekuasaan, khusus dari pemerintah dan agama ; penegakan hukum ; pertukaran gagasan yang bebas ; dan suatu sistem pemerintahan yang transparan, yang didalamnya hak-hak kaum minoritas dijamin.

Contohnya : Amerika Serikat dan Inggris

- ❑ Sistem Politik negara Demokrasi, dimana kekuasaan sepenuhnya ada ditangan rakyat dan sistem politik yang dijalankan adalah berdasarkan atas asas partisipasi masyarakat dalam tiap langkah pembangunannya.

Contohnya : Indonesia

- ❑ Sistem Politik negara Komunis

- tidak peduli persoalan kelas buruh
- pemerintahan yang sentralistik
- peniadaan hak milik pribadi, hak-hak sipil dan politik
- tidak ada pemilihan umum yang terbuka
- tidak ada partai oposisi
- pembatasan kebebasan informasi dan kebebasan berpendapat

Contohnya : Cina, Kuba dan Vietnam

PERAN SERTA DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA

❑ Ciri Masyarakat Politik

1. adanya peningkatan opini publik dalam merespon suatu kebijakan pemerintah
2. adanya partisipasi rakyat dalam mendukung atau menolak sebuah kebijakan
3. adanya peningkatan partisipasi rakyat dalam berbagai kegiatan organisasi politik, organisasi masyarakat maupun kelompok-kelompok penekan.

❑ Tata Cara mengemukakan Pendapat di Muka Umum (Undang-Undang No. 9 Tahun 1998)

Dalam UU ini terdapat aturan mengenai larangan aksi demonstrasi pada saat libur nasional dan saat peringatan hari besar agama, larangan melakukan unjuk rasa di tempat-tempat ibadah. Setiap akan mengadakan aksi demonstrasi, warga seharusnya mengirim surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian mengenai : waktu, tempat, rute perjalanan aksi demonstrasi dan identitas orang yang berperan sebagai penanggung jawab aksi demonstrasi tersebut.

PARTAI POLITIK ALAMI KRISIS, DAYA ARTIKULASI MENURUN

Setelah pemilu (2004), daya artikulasi partai politik menurun. Tidak heran jika sekarang kekuatan di luar negara muncul dengan kekuatan yang lebih kentara. Kondisi ini memperlihatkan betapa partai politik sekarang mengalami krisis. Hal ini disampaikan oleh pengamat Fachry Ali dalam diskusi tentang sikap partai politik terhadap masalah diplomasi pertahanan dan keamanan nasional yg diselenggarakan Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta, Kamis 4 Mei 2006.

Menurut Fachry, partai politik memang sudah bisa menerima hasil pemilu. Namun, pemerintah yang terpilih tidak mampu membuat koalisi nasional secara besar-besaran. “Problemnya, presiden terpilih yang berasal dari partai kecil akan bermasalah ketika berhadapan dengan parlemen. Untungnya ada Jusuf Kalla, yang berhasil menguasai Golkar sehingga bisa membuat stabilitas politik lebih kuat di parlemen,” ujarnya.

Sayangnya, partai seperti PPP hampir tidak bersuara pada kebijakan pemerintah dan rakyat. Bahkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang sudah menempatkan diri sebagai oposisi, tidak punya kepandaian menangkap esensi persoalan. Mereka tidak punya kemampuan meluncurkan persoalan pada saat yang tepat. “Jadinya, fungsi oposisi hampir tidak berjalan, dan yang dilakukan hanya hal-hal kecil. Padahal, PDIP potensial tampil berhadapan dengan pemerintah, ujarnya.

Sumber : Harian Kompas, 5/5/2006

1. Setelah disimak dan baca baik-baik, jelaskan kembali apa telah ditulis sesuai dengan persepsi yang ada dibenak anda !
2. Berikan beberapa penjelasan indikasi tentang terjadinya “krisis” dan “menurunnya daya artikulasi” partai politik di Indonesia pasca pemilu 2004 !
3. Jelaskan dengan memberi alasan, mengapa partai politik sebesar PPP dan PDIP kurang mampu menangkap esensi persoalan bangsa dan negara dalam memberi usulan-usulan konstruktif kepada pemerintah !
4. Tentukan langkah-langkah konkrit upaya-upaya dalam membangun artikulasi partai politik guna meningkatkan kinerja di parlemen !
5. Berikan usulan konkrit, apa yang harus anda lakukan guna meningkatkan kinerja pemerintah dengan mitra kerjanya parlemen :
 - a. Sebagai salah satu kelompok kepentingan !
 - b. Sebagai ketua suatu partai politik !
 - c. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat !
 - d. Sebagai Presiden Republik Indonesia !

TUGAS :

1. Cermati UUD 1945 dan seluruh hasil amandemennya, dan identifikasi prinsip dan nilai dasar apa saja yang menentukan sistem politik Indonesia;
2. Konstruksikan secara skematik sistem politik Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan kondisi empirik yang melingkupinya!